

**IMPLEMENTASI PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS  
(DAK) TRANSPORTASI PEDESAAN DI KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

**TESIS**

**OLEH**

**ARIE FADLI UTAMI  
NPM. 111801020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi  
Pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai**

**Nama : Arie Fadli Utami**

**NPM : 111801020**

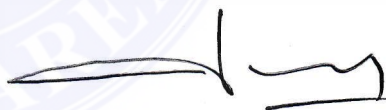
**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Drs. Kariono, MA**

**Pembimbing II**



**Drs. Agus Suriadi, M.Si**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 04 Mei 2013**

---

---

**Nama : Arie Fadli Utami**

**NPM : 111801020**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Warjio, MA**  
**Sekretaris : Ir. Azwana, MP**  
**Pembimbing I : Drs. Kariono, MA**  
**Pembimbing II : Drs. Agus Suriadi, M.Si**  
**Penguji Tamu : Prof. Dr. Subhilhar, MA**

## **PERNYATAAN KEORISINILAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Arie Fadli Utami**

**NPM : 111801020**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

**“Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai”**

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Mei 2013

Yang menyatakan,



**Arie Fadli Utami**

## A B S T R A K

### **Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Pedesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai**

**N a m a : Arie Fadli Utami, NPM : 101801020**

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk daerah Perdesaan atau daerah tertinggal. Pada Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi DAK Transportasi Perdesaan sebesar Rp. 4.024.790.000. Dengan adanya alokasi DAK Transportasi Perdesaan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat “keterisolasian” suatu daerah dengan daerah lain dan tentu saja hal itu akan membuka peluang adanya interaksi sosial dan ekonomi yang akan membangun ketertinggalan daerah terpencil..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai. Sampel diambil secara *purposive sampling*, yaitu yaitu mereka yang secara langsung berkaitan dan terlibat dengan Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 36 orang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan menggunakan table tunggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan, secara umum belum berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan terbatasnya anggaran yang tersedia dengan banyaknya dan luasnya wilayah pedesaan yang harus mendapat dana tersebut

*Kata-kata kunci* : *Implementasi Program, Dana Alokasi Khusus (DAK),  
Transportasi Pedesaan.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS
2. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Bapak Dr. Warjio, MA
3. Bapak Pembimbing I, Bapak Drs. Kariono, MA yang telah banyak membimbing saya guna menyelesaikan Tesis ini
4. Bapak Pembimbing II, Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si yang juga telah banyak memberi saran dan masukan nya untuk menyelesaikan Tesis ini
5. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai Bapak Ir. Yusran Syafri, M.Si
6. Kepala Bidang Jalan dan jembatan Dinas Bina Marga Kab. Serdang Bedagai, Bapak H. Khairul Haitami, ST
7. Kedua Orang Tua saya yang telah memberi saya wejangan dan dukungan kepada saya agar saya lebih giat dalam mencapai cita-cita saya agar menjadi seorang Master Administrasi
8. Istri tercinta saya Hj. Kartika Br Tobing, B.Sc(Hons), ST yang selalu tetap setia menemani saya dalam menyelesaikan tesis ini
9. Teman-teman satu angkatan Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Mei 2013  
**P e n u l i s**

**Arie Fadli Utami**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
LAMPIRAN .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kebijakan Publik.....	10
2.2. Implementasi Kebijakan .....	12
2.3. Model Implementasi Kebijakan .....	16
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	29
3.2. Bentuk Penelitian .....	29
3.3. Populasi Sasaran .....	29
3.4. Sampel Penelitian.....	30
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6. Operasional Variabel.....	31
3.7. Teknik Analisa Data.....	33
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI</b>	
4.1. Gambaran Umum Daerah .....	34
4.2. Gambaran Umum Demografis .....	36
4.3. Kondisi Ekonomi .....	41
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA</b>	
5.1. Hasil Penelitian .....	55
5.2. Karakteristik Responden .....	55
5.3. Variabel Penelitian .....	58



**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan .....	78
6.2. Saran - Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN .....**

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kab. Serdang Bedagai tahun 2012 .....	37
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Kepala keluarga Kab. Serdang Bedagai.....	38
Tabel 4.3. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	39
Tabel 4.4. Persentase Penduduk Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin ..	40
Tabel 4.5. Jenis Perkebunan Kab. Serdang Bedagai Tahun 2012 .....	42
Tabel 4.6. Produksi Perkebunan Tahun 2012.....	43
Tabel 4.7. Produksi dan Pemasaran Perikanan tahun 2012 .....	46
Tabel 4.8. Potensi Industri Kabupaten Serdang Bedagai .....	51
Tabel 4.9. PDRB Kabupaten Serdang Bedagai .....	53
Tabel 4.10. PDRB Kabupaten Serdang Bedagai .....	54
Tabel 5.1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin .....	55
Tabel 5.2. Distribusi Responden Menurut Umur .....	56
Tabel 5.3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan .....	56
Tabel 5.4. Distribusi Responden Menurut Instansi Asal .....	57
Tabel 5.5. Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Program Dana Alokasi Khusus(DAK) .....	59
Tabel 5.6. Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumber Daya Teknologi Dalam Implementasi Program Dana Alokasi Khusus(DAK) .....	61
Tabel 5.7. Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumber Daya Keuangan Dalam Implementasi Program Dana Alokasi Khusus(DAK) .....	62

Tabel 5.8. Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dalam Implementasi Program Dana Alokasi Khusus(DAK)	64
Tabel 5.9. Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksana Dalam Implementasi Program Dana Alokasi Khusus(DAK) Transportasi Pedesaan .....	67
Tabel 5.10. Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksana Dalam Implementasi Program Dana Alokasi Khusus(DAK) .....	68
Tabel 5.11. Pendapat Responden Tentang Output Yang Dihasilkan Dalam Implementasi Program Dana Alokasi Khusus(DAK) .....	75
Tabel 5.12. Pendapat Responden Tentang Manfaat Implementasi Program Dana Alokasi Khusus(DAK) .....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengesahan Dan Kesiadaan sebagai Komisi Pembimbing Tesis .....
2. Surat Permohonan Izin Penelitian .....
3. Surat Keterangan Pelaksanaan/Selesai Penelitian .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk daerah Perdesaan atau daerah tertinggal. Tanpa adanya sistem transportasi yang baik dan sarana transportasi yang menunjang akan mengakibatkan rendahnya produktifitas suatu daerah yang pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Di Indonesia masih terdapat sekitar 183 kabupaten yang memiliki kriteria sebagai daerah tertinggal. Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta data Keuangan Kabupaten dari Departemen Keuangan di Indonesia, terdapat 6 kriteria dasar daerah tertinggal, yaitu : perekonomian masyarakat; sumberdaya manusia; prasarana (infrastruktur); kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); aksesibilitas dan karakteristik daerah; serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik (Margareta, 2000.)

Keberadaan daerah tertinggal merupakan bentukan dari ketidakmerataan pembangunan di Indonesia. Terdapat perbedaan yang mencolok antara pembangunan di perkotaan dengan daerah perdesaan. Kesenjangan ini mengakibatkan akses masyarakat perdesaan terhadap dunia luar rendah, produksi pertanian didesa yang diharapkan dapat meningkat malah terhambat karena pelayanan transportasi yang disediakan pemerintah tidak memadai. Pembangunan perdesaan akan mengalami stagnansi dan terhambat karena minimnya sarana transportasi yang ada (Giyarsih, 2007)

Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang dipercayakan rakyat memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam menyediakan atau memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, khususnya untuk daerah perdesaan/tertinggal. Tanggung jawab ini tidak semata di kelola oleh pemerintah pusat saja melainkan harus terdapat koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang terkait dalam usaha penyediaan pelayanan transportasi bagi daerah-daerah tertinggal. Sebagaimana definisi pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 , yaitu :

“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. (Keputusan MEMPAN Nomor 63/2003)

Dari definisi diatas dapat dilihat pelayanan umum atau pelayanan publik mencakup segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang terkait dalam penyediaan pelayanan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan yang ada.

Dari 398 kabupaten di Indonesia, masih terdapat sekitar 183 kabupaten yang masuk kedalam kategori daerah tertinggal. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi perdesaan dapat dijelaskan dari alokasi dana pendapatan pemerintah pusat melalui transfer kedaerah yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2011, ada sekitar 42 kabupaten tertinggal yang mendapat alokasi DAK Transportasi Perdesaan (Transdes). Jumlah yang masih sedikit mengingat masih banyaknya kabupaten di



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arifin, Anwar, 1988, *Ilmu Komunikasi*, LKII, Ujung Pandang.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brinkerhoff, Derick W- Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Fisher, B. Aubrey, 1986, *Teori-Teori Komunikasi : Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis*, Remadja karya CV., Bandung.
- Giyarsih. Sri Sum. 2007. *Transportasi dan Aksesibilitas Perdesaan*. Makalah Geografi Transportasi Fakultas Geografi UGM
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Margareta, Hensi. 2000. *Perbaikan Sistem Transportasi di Perdesaan di Era Otonomi Daerah*. Makalah Geografi Transportasi Fakultas Geografi UGM.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Simanjuntak, Payaman J., 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## ***Dokumen***

**Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003  
Tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.**

**Peraturan Menteri No.73 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana  
Alokasi Khusus Kementrian Dalam Negeri Tahun 2012 (Lampiran II,  
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang  
Transportasi Perdesaan Tahun 2012.**

**Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 Tentang Masterplan  
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonseia 2012-2025.**